



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 803/II/2014

III/FEBRUARI 2014



Undang-undang Perdagangan Karya Monumental DPR



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2014

Minggu ketiga Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 11 Februari dengan beberapa agenda, diantaranya; Pengambilan keputusan RUU tentang Perdagangan, Laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan calon Hakim Agung dan pendapat fraksi-fraksi atas dua RUU inisiatif, yaitu dari Komisi I dan V. Selain itu, juga terdapat progress report DPR RI terhadap tim pengawasan perlindungan TKI.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Laporan Kegiatan Rapat Paripurna

Rapat paripurna diisi dengan empat agenda, yaitu : *Pertama*, pembicaraan tingkat I/pengambilan keputusan terhadap RUU Perdagangan. Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam laporannya, Ketua Komisi VI melaporkan hasil pembicaraan tingkat I. Diantaranya, bahwa RUU ini adalah usulan Pemerintah dan bertujuan untuk memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing. Perkembangan perdagangan era globalisasi masa kini dan masa depan menuntut Pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu, dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan kepentingan nasional serta prinsip tata kelola yang baik.



Dalam perspektif konstitusional, perdagangan nasional disusun sebagai suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam perspektif yuridis, RUU perdagangan sangat penting kehadirannya, karena sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai UU yang mengatur perdagangan secara menyeluruh. UU ini juga diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. RUU perdagangan mengamanatkan perlu nya ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. RUU perdagangan terdiri dari 19 Bab dan 122 Pasal.

Kedua, laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, dilanjutkan pengambilan keputusan. Ketua Komisi XI melaporkan perihal tindak lanjut penugasan dari Pimpinan DPR untuk membahas surat masuk dari Ketua BPK RI tertanggal 16 Oktober 2013. Berdasarkan penugasan Pimpinan DPR, maka Komisi XI telah melakukan rapat intern pada tanggal 18 Desember 2013 dan memutuskan menyetujui perubahan masa jabatan dua anggota BPK RI, yaitu Drs. Bahrullah Akbar B.Sc, SE, MBA dan Agus Joko Pramono, S.ST, Ak, M.Acc, yang semula berdasarkan pasal 22 ayat 4 UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan, **menjadi** masa jabatan 5 tahun berdasarkan putusan MK RI No.13/PUU-XI/2013 yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

Ketiga, laporan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan calon Hakim Agung, dilanjutkan pengambilan keputusan. Dalam laporannya, Ketua Komisi III melaporkan bahwa berdasarkan pelaksanaan tahapan uji kelayakan terhadap tiga orang calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, yaitu H.Suhardjono, SH.MH, Maria Anna Samiyati, SH, MH, dan Dr. H. Sunarto, SH, MH, diputuskan melalui suara terbanyak, bahwa ketiganya tidak mendapatkan persetujuan. Komisi III berpendapat bahwa ketiganya belum memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan materi hukum serta tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR RI. Pertimbangan yang diberikan oleh Komisi III bersifat obyektif untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik,



demi menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Keempat, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan, terhadap dua RUU inisiatif AKD menjadi RUU usul DPR RI, yaitu RUU usul inisiatif Komisi I tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI dan usul inisiatif Komisi V tentang Pencarian dan Pertolongan. RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI mengatur tentang ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi tiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan sapta marga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban, serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. RUU usulan Komisi I ini disetujui oleh rapat paripurna menjadi RUU inisiatif DPR. Sedangkan terkait usulan Komisi V tentang RUU Pencarian dan Pertolongan atau yang dikenal dengan *search and rescue*, adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari kecelakaan, bencana dan kondisi yang membahayakan adalah tugas Negara. Karenanya, pengaturan tentang pencarian dan pertolongan saat ini perlu diatur secara komprehensif sesuai dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan hukum masyarakat.

Progress Report Tim Pengawas TKI DPR RI

Tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI dibentuk berdasarkan keputusan DPR RI tertanggal 12 Februari 2013. Namun, Timwas TKI baru mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2013. Timwas dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra, Bapak Taufik Kurniawan dan beranggotakan 30 anggota berasal dari lintas Komisi dan Fraksi. Tim telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain pertemuan dengan berbagai *stakeholder* yang terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri, kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh Timwas

TKI melalui berbagai kegiatan, baik Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan luar negeri ke Malaysia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa. *Kedua*, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI sangat kompleks dan bersifat *cross cutting issue*/lintas sektoral. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan. *Ketiga*, Sebagian besar permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri. *Keempat*, Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 Kementerian/Lembaga, dan Badan. Dalam pelaksanaan di lapangan, masing-masing kementerian/lembaga, dan badan masih cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terkoordinasi dengan baik. *Kelima*, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, diketahui bahwa beberapa persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia antara lain: a. Program Khas Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin/PATI yang dimulai pada 21 Oktober 2013, berakhir pada 20 Januari 2014; b. TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati; dan c. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TKI di Malaysia.

Keenam, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, persoalan penting yang dihadapi adalah: a. Banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui visa umroh/haji dan ziarah secara non-prosedural mengakibatkan banyaknya TKI yang bekerja tanpa memiliki dokumen dan berstatus *overstayer*. b. Berakhirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi WNI/TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013. *Ketujuh*, Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), antara lain tidak terdata di perwakilan negara setempat, banyaknya ABK yang terdam-

par di beberapa negara, dan adanya ABK yang terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana.

Terkait dengan kesimpulan tadi, maka tim perlu segera menindaklanjuti masalah yang ada, antara lain terkait dengan **fungsi legislasi** yaitu; *Pertama*, penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Kedua*, Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). *Ketiga*, Melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, yaitu: a. Konvensi ILO No. 189 tentang *Domestic Worker* (Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga), b. Konvensi Pekerja Maritim/*Maritime Labor Convention* Tahun 2006; dan c. Konvensi ILO No. 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.

Terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia, ada beberapa rekomendasi, yaitu; *Pertama*, Mendorong pemerintah untuk melakukan antisipasi batas akhir amnesti bagi pekerja yang tidak berdokumen/bermasalah dengan dokumen. *Kedua*, Pembahasan bersama antara Parlemen RI dan Parlemen Malaysia mengenai perlindungan TKI di luar negeri, termasuk TKI yang sedang menghadapi masalah dengan hukum dan TKI yang terancam hukuman mati. Sedangkan untuk perlindungan TKI di Arab Saudi, ada dua rekomendasi, yaitu; *Pertama*, Mendorong pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu amnesti kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. *Kedua*, Melakukan antisipasi pemulangan TKI dan lobi terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan *exit permit* tanpa harus menyertakan dokumen lama. Untuk penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK), rekomendasi yang ada adalah memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penempatan ABK, yaitu: Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan, dan LPSK.

Undang-undang Perdagangan Karya Monumental DPR



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan di Paripurna.

RUU Perdagangan akhirnya disetujui menjadi UU lewat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/2). Inilah karya monumental Komisi VI DPR RI setelah sebelumnya kita masih menggunakan produk UU warisan kolonial Belanda.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (F-PG) dalam laporannya di hadapan Paripurna DPR, menyampaikan, “Dalam perspektif yuridis, RUU tentang Perdagangan sangat penting kehadirannya, karena sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki UU yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. RUU tentang Perdagangan ini juga diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.”

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo yang memimpin Rapat Paripurna ini telah mengetuk palu tanda disetujui RUU ini menjadi UU. Sebelumnya, memang sempat ada interupsi dari beberapa fraksi menyangkut

materi pasal-pasal. Namun, kemudian secara bulat naskah RUU Perdagangan disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 masa sidang III.

Selanjutnya, RUU ini mengamatkan agar peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri sebagai aturan turunannya menyesuaikan dengan RUU ini. Misalnya, peraturan pemerintah harus memuat sanksi administrasi terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran. Untuk peraturan presiden diamanatkan mengatur perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan.

Sementara dalam peraturan menteri diamanatkan untuk menyusun sanksi administratif bagi eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang. Dengan demikian, RUU ini nantinya menjadi lebih konprehensif

mengatur hulu hingga hilir semua persoalan perdagangan.

“Dengan disetujuinya RUU tentang Perdagangan menjadi UU, diharapkan UU tentang Perdagangan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal-formal, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perdagangan di Tanah Air,” tandas Airlangga.

Dengan RUU Perdagangan ini pula diharapkan, pertumbuhan perdagangan Indonesia semakin maju dan berdaya saing di era globalisasi. Apalagi, RUU tersebut juga sangat melindungi pelaku UKM dan koperasi. Bahkan, pasar rakyat mendapat tempat dan perhatian khusus dalam RUU Perdagangan. Inilah sebuah kepedulian yang patut mendapat apresiasi tinggi. Ekonomi rakyat niscaya menggeliat seiring perlindungan dan dorongan yang diberikan oleh RUU tersebut. (mh)/foto:iwan armanias/parle.



DPR RI dan Pemerintah Sepakat Angkat Penyuluh Pertanian Menjadi PNS



Suasana Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi II dan Komisi XI DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah sepakat untuk secara bertahap dan berbasis kinerja, mulai tahun 2014 mengangkat 23.771 orang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengacu kepada UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kesepakatan dicapai, saat Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi II dan Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan, Selasa (11/2), di Gedung parlemen, Senayan.

“Rapat Gabungan bersepakat untuk mengangkat 10.000 orang pada tahun 2014 dari Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Selain itu, Rapat Gabungan me-

nyepakati tambahan anggaran untuk pengangkatan honor dan biaya operasional Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang dialokasikan pada APBN-P Tahun 2014 Kementerian Pertanian.

Seperti diketahui, petani di Indonesia didominasi oleh petani tradisional yang memiliki keterbatasan dalam mengadopsi kebijakan pemerintah, terutama dalam mencapai target swasembada pangan nasional. Oleh karena itu kehadiran penyuluh sangat diperlukan untuk mendampingi masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, serta masyarakat di sekitar hutan. Ini sebagai proses pembelajaran agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya

Keberhasilan suatu program pemerintah bidang pertanian, tidak lepas dari peran para penyuluh pertanian, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

“Pemenuhan kebutuhan penyuluh menjadi perhatian khusus Komisi IV DPR RI karena Penyuluh merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Selain itu keberadaan penyuluh merupakan wujud dari kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” tegas Herman Khaeron.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, jumlah tenaga penyuluh PNS hanya 30% dari jumlah petugas penyuluh pertanian yang bekerja pada lini desa binaan. Adapun, sisanya diisi oleh petugas penyuluh yang berasal dari Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP).

Dari jumlah keseluruhan petugas yang ada saat ini Pemerintah masih kekurangan jumlah petugas sebanyak 21.610 personel untuk bisa memenuhi komposisi 1 penyuluh 1 desa. Kendala berikutnya adalah, memasuki tahun 2014 dan seterusnya akan semakin banyak penyuluh pertanian PNS yang memasuki masa usia pensiun.

Itu berarti jumlah penyuluh pertanian akan semakin berkurang. Sementara itu sistem perekrutan penyuluh pertanian secara reguler tidak mampu mengimbangi angka penyusutan jumlah penyuluh pertanian PNS. Kekurangan jumlah petugas penyuluh PNS ini sebenarnya dapat dipenuhi oleh penyuluh yang berasal dari THL-TBPP.

Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat Gabungan tersebut, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Winny Dian Wibawa, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Mariatul Aini. (as)

foto:odjje/parle/ry

RUU Keinsinyuran Segera Disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi insinyur pun telah dirumuskan secara komprehensif.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar (F-PG), Rabu (12/2), mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi yang hadir. Semua fraksi menyatakan setuju agar RUU ini segera disahkan menjadi UU. Selama ini, kata Rully, tenaga insinyur Indonesia belum sepenuhnya dihargai dan disetarakan dengan para insinyur luar negeri. Di sinilah pentingnya kehadiran RUU Keinsinyuran untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi para insinyur dalam negeri.

“Profesi insinyur belum menjadi minat banyak mahasiswa kita dan para insinyur yang ada pun lari ke luar negeri karena lebih dihargai,” ungkap Rully usai memimpin rapat Pansus. Kini, tenaga insinyur segera mendapat kesetaraan dengan insinyur luar negeri. Tarif jasa insinyur Indonesia yang selama ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan insinyur luar negeri, akan segera disetarakan. Dengan



Mendikbud M. Nuh didampingi Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar saat menandatangani RUU Keinsinyuran.

begitu penghargaan terhadap tenaga insinyur Indonesia cukup mendapat perhatian.

Yang juga penting dalam RUU Keinsinyuran ini adalah adanya sertifikasi insinyur sebagai kompetensi keahlian untuk menciptakan daya saing di era globalisasi. Sertifikasi tersebut ditujukan untuk menjaga produk jasa para insinyur. Dengan begitu, ada semacam jaminan mutu kerja para insinyur. Kelak, pemerintah juga dihimbau menyediakan lapangan kerja yang luas

bagi para insinyur.

Rully berharap, dengan pemberdayaan tenaga insinyur yang menguasai IPTEK, Indonesia tidak lagi menjadi negara konsumen yang menikmati produk-produk teknologi negara maju. Dengan memberdayakan para insinyur dalam negeri, Indonesia harus menjadi negara produsen teknologi. “Kita tidak ingin menjadi bangsa kuli di negeri sendiri,” tandas Rully. (mh) foto:odjiej/parle/ry

DPR Diminta Percepat Pembahasan RUU PPDK

Sebanyak tujuh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Propinsi Kepulauan sangat mengharapkan perhatian Pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK). UU tersebut akan dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkualitas di Propinsi Kepulauan.

Demikian mengemuka dalam *Forum Group Discussion* Pansus RUU PPDK dengan para rektor dan akademisi diantaranya Universitas Pattimura Ambon, Universitas Cendana Kupang, Unsrat Manado dan Universitas Internasional Batam, Kepri di Gedung DPR, Senayan, Rabu (12/2).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Alex Litaay dan dipandu moderator Inosensius Samsul dari P3DI Setjen DPR, Prof. Thomas Pentury dari Unpatti mengatakan, dari sisi hukum, apabila RUU PPDK disahkan menjadi UU akan berfungsi sebagai “*lex specialis*” dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang ada atau akan diadakan, sepanjang mengenai propinsi kepulauan, harus mengabdikan pada UU PPDK.

Prof David dari Unsrat menghargai upaya Pansus untuk melahirkan UU PPDK dan menolak pandangan Pemerintah bahwa UU ini tumpah tindih. DPR mengajukan RUU ini melalui perdebatan dan pengumpulan naskah yang panjang, justru sekarang ini tinggal sentuhan terakhir untuk mene-



Suasana Forum Group Discussion Pansus RUU PPDK dengan para rektor dan akademisi.

rima RUU dan segera disahkan menjadi UU. “Kesimpulan kami RUU ini segera disahkan karena perangkat undang-undang ini lahir dari beberapa propinsi,” ujarnya.

Staf Pengajar Undana Kupang Kotan Y. Stefanus mengapresiasi kepada DPR yang telah mengajukan Inisiatif RUU PPDK. RUU ini dimaksud menampilkan pengakuan pemerintah terhadap kewenangan daerah kepulauan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, sesuai amandemen UUD 45. “Rupanya DPR telah menyelami aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini menggantung harapan hidup daerah kepulauan. Selain itu DPR juga telah memahami dinamika desentralisasi di Indonesia yang mangabaikan model desentralisasi asimetris,” ucapnya.

Sementara Dekan FH Universitas Internasional Batam Lu Sudirman mengharapkan RUU ini mengatur secara rinci dan khusus daerah kepulauan sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Menurutnya, daerah kepulauan mempunyai sumbangsih yang besar khususnya bagi ekonomi nasional. Bahkan dia mempunyai mimpi, kalau daerah kepulauan di seluruh Indonesia dimanfaatkan secara benar, alangkah luar biasanya potensi pendapatan daerah maupun pendapatan pusat untuk pembangunan ini. (mp,ar) foto:odjie/parle/ry

Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan India Perlu Diratifikasi



Suasana rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Kadiskum Polri dan Biro Hukum Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin mengatakan, perlunya meratifikasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan India. Hal ini mengingat orang Indonesia sangat sedikit melakukan kejahatan di India, sementara warga India yang melakukan kejahatan di negaranya sebagian lari ke Indonesia.

Demikian disampaikan TB. Hasanuddin usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Kadiskum Polri dan dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung, Rabu (12/2), di ruang rapat Komisi I DPR.



Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin.

TB. Hasanuddin berharap, DPR bersama-sama dengan Pemerintah segera melakukan ratifikasi ekstradisi tersebut demi kepentingan dan penegakan

hukum, juga agar lebih jelas kepastian hukum di Indonesia dan juga di India.

Mengomentari imigran gelap yang diusir dari perairan Australia ke Indonesia dengan sekoci, Hasanuddin mengatakan, itu sudah menyalahi hak asasi manusia yang ada di dalam konvensi Internasional PBB dan hal ini bisa dibawa ke Mahkamah Internasional.

Dia menambahkan, Australia harus belajar lagi bagaimana memperlakukan para imigran gelap karena itu ada Undang-Undangnya dan juga ada aturannya.

Hasanuddin berharap, pemerintah Australia sebaiknya duduk bersama dengan negara-negara lain negara-negara asal untuk menyelesaikan masalah ini dan jangan melakukan tindakan diluar ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang berlaku atau hukum lokal yang berlaku.

Komisi I DPR secara resmi sudah meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam rangka menjaga kedaulatan, karena setiap jengkal tanah harus kita jaga dan kita pertahankan. “Kita semua pasti mampu dan kita pasti bisa,” tegasnya. (spy). foto:andrie/parle/ry

Sohibul Iman Terima Pesepak Bola Cilik, Alif Tristan



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman unjuk kebolehan di depan pesepak bola cilik Alif Tristan.

Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman Rabu (12/2) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta menerima Alif Tristan- anak berusia sembilan tahun yang memiliki bakat sepak bola luar biasa. Alif yang juga dijuluki Messi-nya Indonesia didampingi kedua orang tua serta dihadiri oleh pejabat dari Kemendikbud, Kemenlu dan juga Pertamina.

Maksud kedatangan Alif di Gedung DPR ingin meminta bantuan solusi terkait regulasi Pemerintah Belanda dan FIFA yang melarang anak berusia dibawah 16 tahun bermain sepak bola di luar negeri tanpa adanya pendampingan dari orang tuanya.

“Persoalannya Alif yang masih berusia sembilan tahun, kalau langsung dia berangkat kesana berarti ini masuk dalam kategori mempekerjakan anak dibawah umur. Karena itu, perlu dicari solusi oleh pihak Ajax dan Kedubes RI untuk bisa tetap berangkat asal mengikuti orang tuanya. Masalahnya orang tuanya pekerja disini, “ ujar Politis PKS

Dalam pertemuan ini Sohibul menyatakan akan berupaya agar orang tua Alif dapat tinggal di Belanda sehingga tidak melanggar regulasi yang ada. Salah satunya ia meminta kepada KBRI di Belanda agar memberikan status pegawai dan mengusulkan agar

orang tua Alif dapat menjadi pengajar di sekolah Kedubes RI. Hal ini disambut baik oleh KBRI sehingga perlu adanya koordinasi dengan Kemendikbud. Selain itu ia juga menyambut baik dengan adanya bantuan dari pihak lain dengan memberikan sponsor kepada Alif.

“Kedutaan Besar Republik Indonesia siap untuk memberikan status pegawai untuk orang tua Alif. Mungkin yang paling pas adalah sebagai guru di sekolah KBRI di sana. Oleh karena itu koordinasi dengan Kemendikbud perlu dilakukan. Akan sangat bagus jika ada pihak lain yang memberikan sponsor,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa alternatif usulan, diantaranya lewat jalur negara, atau juga bisa lewat BUMN. “Tentu harus kita kaji karena harus disesuaikan dengan aturan di sana. Kita juga berharap Kementerian terkait yakni Kemenlu, Kemendikbud, Kemenpora atau juga BUMN siap untuk memberikan bantuan,” harap Pimpinan DPR Korekku ini.

Ibu Alif, Ny. Irma Lansano mengharapkan, sebagaimana cita-cita Alif ingin bermain bola di Eropa. Untuk itu selaku orang tua, ingin meminta DPR memfasilitasi dengan instansi lain sehingga impian menjadi pemain sepak bola di Eropa bisa tercapai. Alif, katanya, merupakan satu-satunya anak non Eropa yang diterima langsung oleh klub sepak bola Ajax. “Saya berharap pemerintah membantu dan Alif segera bergabung di klub sepak bola di Belanda tersebut,” ujarnya. (mp,ar)
foto: andrie/parle/ry

Pemerintah Didesak Tingkatkan Anggaran SDA

Terkait banjir bandang diberbagai daerah seperti Jombang, serta jebolnya tanggul kanan Kali Guntung, Anggota DPR (F-PDIP) Sadarestuwati mendesak Pemerintah segera menin-

gkatkan anggaran di sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk menormalisasi sungai yang ada di sekitar wilayah tersebut.

“Kita minta peningkatan anggaran SDA untuk normalisasi sungai bukan hanya sungai besar tetapi juga sungai yang ada di Kabupaten,” ujarnya saat Raker Komisi V DPR dengan Menteri



Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati.

PU Djoko Kirmanto, Rabu, (12/2).

Menurutnya, perlu penanganan serta merelokasi dan menata masyarakat sekitar bantaran sungai. “Di Lamongan, Bojonegoro semua bantaran sun-

gai terkena dampak banjir, sementara di Mojokerto semua bantaran sungai mengalami penyempitan.

“Perlu penataan dan inventarisasi serta melakukan skala prioritas bagi daerah yang padat penduduk,” ujarnya.

Dirinya meyakini bahwa bencana banjir dan longsor akan terus berlanjut karena sudah habisnya sebagian hutan di hulu. “Banyak jalan putus, serta dilakukan penanganan jalan yang mengalami kemiringan,” tambahnya.

Dia menambahkan, penanganan infrastruktur akibat bencana bukan hanya di Manado, bahkan di Pantura hampir

semuanya perlu segera di inventarisasi jalan yang rawan banjir. “Perlu teknologi baru atau bahan baku yang membuat jalan lebih tahan genangan air,” terangnya.

Terkait hasil tindak lanjut laporan BPK terhadap Kementerian PU, anggota DPR Rendy lamadjido (F-PDIP) mengatakan, kondisi temuan tidak jauh beda dengan temuan tahun 2009, 2010, dan 2011 lalu. “Masih banyak ditemui persoalan tanah, dan kita minta Kementerian PU bekerjasama dengan tim BPK untuk melakukan audit menyeluruh dan menghapuskan mana saja inventaris yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak,” tambahnya. (si)

Ketua DPR Kritik Jokowi Tidak Pro Industri Dalam Negeri

Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengimport busway/BKTB dari China mengundang keprihatinan Ketua DPR Marzuki Alie. Kebijakan itu menurutnya jelas tidak sejalan dengan keinginan Indonesia membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat.

“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri. Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/1).

Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk membangun industri. Jika memang mau membangun ekonomi nasional, harusnya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengimport bus yang Indonesia sanggup membuatnya. Dengan kebijakan import ini jelas tidak terlihat niat untuk membangun ekonomi nasional.

“Kita sudah lihat kok faktanya bus-bus yang dibangun industri karoseri dalam negeri memiliki aspek teknis yang mampu bersaing dengan industri sejenis di luar negeri. Bus tersebut juga sudah banyak digunakan di Indonesia maupun di luar negeri, jadi kenapa ha-

rus impor? Katanya mau membangun ekonomi dalam negeri, tapi urusan bus saja harus import,” tambahnya.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Marzuki melihat dibandingkan dengan bus import dari China yang dibeli oleh pemprov DKI Jakarta, bus buatan dalam negeri jauh lebih baik. “Kalau bus nya seperti itu, kita mampu membuat yang lebih baik dari aspek kualitas. Jadi saya sangat prihatin, ditambah lagi munculnya isu adanya *mark up* dalam pengadaan bus tersebut,” jelasnya.

Selain itu dengan membeli bus dari luar negeri, banyak devisa yang lari ke luar negeri ditambah hilangnya kesempatan anak bangsa untuk bekerja di sektor industri rancang bangun. Kalau

bus itu dibangun di dalam negeri, paling tidak ada sedikit upaya untuk sedikit menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara lainya.

Hal yang sama dikatakan, anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mendesak impor bus Trans Jakarta yang diduga merupakan barang bekas, perlu diusut tuntas. Bila ditemukan unsur penyelewengan atau *mark-up* maka harus diterapkan sanksi tegas yang menjerakan.

Menurut Teguh yang duduk di Komisi V (bidang perhubungan dan transportasi), armada Trans Jakarta sebagai moda transportasi publik kualitasnya harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini sejalan dengan tekad Pemprov. DKI Jakarta yang akan meningkatkan layanannya, ternyata kemudian dalam pelaksanaan tender ditemukan banyak masalah.

“Saya setuju apa yang disampaikan kepala daerah harus diusut tuntas. Pasti akan ketemu apa yang tidak benar dimulai dari proses tendernya kemudian pelaksanaannya. Kalau pemenang tender ternyata menurunkan spec atau kualitasnya, maka harus diusut dan dijatuhkan hukuman atau sanksi yang menjerakan,” tandas Teguh. (tim parle)

Komisi II DPR Apresiasi Gerakan Sejuta Relawan Pemilu Jateng



Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko.

Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko memberikan apresiasi terhadap Gerakan Sejuta Relawan Pemilu di Jawa Tengah (Jateng) yang menargetkan sampai 1 juta orang.

Hal tersebut disampaikan Budiman, saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi II dengan Bawaslu Jateng dan Panwaslu seluruh Kabupaten/Kota di Jateng, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Khatibul Umam Wiranu di Kantor Bawaslu Jateng di Semarang, Senin (10/2)

“Suatu hal yang menarik bahwa ada partisipasi publik. Ini penting secara strategis untuk mengcounter adanya isu-isu golput dan juga untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat,” kata politisi F-PPDIP dapil Jawa Tengah.

Namun, kata Budiman, permasalahan yang harus dicermati adalah mereka bukan orang baru dan akan dijadikan sebagai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL), apakah betul selama ini mereka tidak pernah ikut sebagai anggota salah satu partai politik.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah menjelaskan bahwa terkait Mitra PPL atau Gerakan Sejuta Relawan, untuk Jawa Tengah sudah menginventarisir sekitar 4.500 relawan, di Kabupaten/Kota sekitar 100 orang dan di tingkat Provinsi sekitar 1.000.

“Untuk mensolidkan, kami akan melakukan inventarisasi dengan biodata yang lengkap sampai nomor HP, email, facebook maupun tweeternya dalam form Gerakan Sejuta Relawan tersebut,” kata Abhan.

Pada tahun 2014 ini, papar Abhan, untuk menyiapkan jumlah Mitra PPL Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten/Kota menyisir kembali datang ke Kampus-kampus, Sekolah SLTA kelas III, Ormas, LSM dan lain-lain, termasuk ketika Bawaslu saat diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dimanapun.

“Kami selalu menyampaikan pentingnya pengawasan berbasis masyarakat dan peran serta masyarakat, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam Gerakan Sejuta Relawan. Kami tidak akan menjanjikan misalnya soal honor atau yang lain. Tapi kami bisa memberikan ID Card dan nanti Piagam kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurut Abhan, dalam perkembangannya, Mitra PPL akan diambilkan dari orang-orang atau personal dari Gerakan Sejuta Pemilu. Jadi ini bukan baru tapi ini meneruskan atau istilahnya naik kelas.

“Misalnya kalau orang dari Gerakan Relawan ini orangnya bagus, dan mempunyai visi pengawasan yang bagus akan kita naikan kelas menjadi Mitra PPL,” ujar Abhan.

Yang terpenting, tegas Abhan, bahwa visi kami adalah bagaimana pemilu yang dilaksanakan benar-benar berjalan fair. (sc) foto: ry/parle.

Pakar Hukum Sarankan Revisi RUU KUHP Ditunda

Pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seharusnya ditunda saja, sebab waktu yang dimiliki Komisi III DPR efektifnya tinggal 3 bulan. Apalagi niatnya adalah untuk mengubah atau membongkar 700 pasal, bukan sekedar merevisi sedikit pasal.

“Saya condong pembahasan KUHP itu ditunda saja. Pembahasan KUHP

yang begitu vital dan sangat tebal itu, tidak boleh dengan mengejar target, dan hanya karena Komisi III DPR ingin menorehkan sejarah penting,” ujar pakar hukum dari FHUI Akhbar Salmi, dalam diskusi di DPR, Selasa (11/2).

Menurut dia, waktu yang ada sekarang jelas sangat mepet, meski masa sidang hingga September, tapi efektif tak lebih dari empat bulan, karena bu-

lan April ada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada Juli. Tenaga anggota DPR pasti sudah tersedot di situ, tak sempat memikirkan secara jernih.

Dia menambahkan, pembahasan KUHP merupakan pekerjaan besar karena mengubah induk hukum di Indonesia. Banyak hal akan dimasukkan, mengingat KUHP yang ada sekarang



Suasana Forum Legislasi di Press Room DPR.

adalah peninggalan Belanda. “Mengubah hukum itu harus mendapat pemahaman dari rakyat, sebab kalau rakyat tidak mendapat pemahaman yang cukup, bisa memberi kacau perubahan pola pikir mereka,” katanya.

Ia mengingatkan, hukum adalah kristalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kita juga harus berakar pada nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang dilarnag di Indonesia, belum tentu dilarang di luar negeri. “Jadi, UU KUHP tinggalan Belanda itu memang perlu disaring dalam

suasana yang jernih dan disesuaikan dengan nilai-nilai Indonesia,” katanya.

Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofriandari Ronald juga pesimis revisi KUHP yang punya 700 pasal tersebut akan selesai dengan baik, karena dengan 1.200 DIM, ditambah lagi tahun politik di mana anggota DPR RI lebih konsentrasi ke daerah pemilihannya untuk pemilu DPR 9 April mendatang, terbukti dalam 2 kali rapat pembahasannya tidak signifikan. “Sebuah persoalan serius tentang KUHP dan KUHP tak bisa dibahas seperti RUU

biasanya,” katanya.

Ronald mengatakan masa waktu yang tersisa bagi DPR dipercaya tidak bisa menyelesaikan pembahasan RUU KUHP dan KUHP, apalagi Pemerintah sebagai mitra kerjanya dianggap lamban. “RUU KUHP, KUHP, Kejaksaan, MD3, Pilkada dan Pemda, merupakan RUU kelas berat. Tidak mungkin enam RUU tersebut bisa diselesaikan dalam 109 hari masa kerja efektif DPR,” katanya.

Menurut Ronald, RUU KUHP dan KUHP sudah masuk dalam RUU prioritas program legislasi nasional sejak tahun 2010 lalu. Namun, pembahasan ini juga belum diselesaikan karena pemerintah tak sigap. “RUU KUHP dan KUHP ini sudah masuk dalam prioritas prolegnas sejak tahun 2010. Dalam proses pembahasannya di DPR, saya melihat pemerintah lamban menyikapinya sehingga DPR dengan sendirinya tidak bisa juga berbuat banyak,” tegasnya.

Bahkan lanjutnya, pada November 2012, pemerintah kembali menyerahkan draf RUU KUHP dan KUHP ke DPR. “Dari beberapa kali rapat dengan pemerintah, DPR merasa pemerintah tidak dalam kondisi siap membahasnya,” ujar Ronald. (nt) foto:ry/parle/andrie.

Sekjen Akan Kirim Tujuh Staf ke Kongres Amerika



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat menerima USAID dan Library of Congress (LoC).

Kerja sama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan USAID dan Library of Congress (LoC) sudah berjalan selama 15 tahun. Dua lembaga dari Kedubes Amerika ini banyak memberi bantuan teknis dan pemikiran yang dibutuhkan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Program pertukaran staf antara DPR dan Kongres Amerika juga sudah berjalan. Ada 2 staf Sekretariat Jenderal DPR yang sudah bekerja selama satu bulan di Kongres Amerika. Rencananya tahun ini, Sekretariat Jenderal DPR akan mengirim lagi 7 stafnya untuk mendapatkan kursus singkat di Amerika. “Ini pengalaman yang sangat bagus bagi staf,” kata Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, usai pertemuan dengan utusan USAID dan LoC, Rabu (12/2).

Dalam pertemuan tersebut hadir Miles F Toder *Director of Democratic Governance* dari Kedubes Amerika Serikat dan Mr. Will dari USAID. “Sebetulnya kita kerja sama sudah lama sekali sekitar 15 tahun dengan *Library of Congress*. Kita dikasih buku-buku dan ada pertukaran kunjungan. Layak saya berterima kasih atas kerja samanya selama ini,” ungkap Win, Sekjen DPR RI.

Hanya saja, lanjut Win, kunjungan tamunya itu untuk menyampaikan masa tugasnya yang berakhir di Indonesia sekaligus ingin berpamitan. Namun demikian, kerja sama

akan terus berjalan. “Saya minta supaya program kerja sama ini terus berlangsung,” harap Win. Bahkan, DPR pun terbuka bagi negara-negara sahabat yang ingin mengirim stafnya untuk belajar di sini.

Win juga menuturkan, para staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang ikut belajar di Amerika sebelumnya cenderung pasif. Hanya diam dan mendengarkan saja. Kini, para staf DPR itu sudah mulai berani menyampaikan ide-ide dan pandangannya di forum-forum internasional. “Kebetulan staf PNS kita yang terus dipantau oleh mereka. Jika dulu hanya duduk dan mendengar. Tapi, sekarang sudah tegak dan be-

rani menyampaikan pendapat secara terbuka. Jadi, ini luar biasa kemajuannya,” tutur Win.

Sementara soal program pengiriman 7 staf DPR ke Amerika, rencananya akan diberangkatkan pada awal Maret 2014. Persyaratan kualifikasi bagi staf untuk bisa masuk program ini adalah memenuhi TOEFL dengan nilai minimal 550. Staf di Komisi I, BKSAP, dan peneliti sangat terbuka untuk ini. Sebelumnya, mereka yang akan diberangkatkan itu akan diwawancarai terlebih dahulu di Kedubes Amerika. (mh) foto: [ry/parle/odjie](#).

Komisi VII DPR Dorong Produktivitas dan Pendayagunaan Iptek

Komisi VII DPR RI mendorong peningkatan produktivitas dan pendayagunaan iptek serta realisasi program atau kegiatan sesuai bidang prioritas tahun 2014 dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Demikian salah satu butir kesimpulan Rapat Komisi VII DPR dengan Menristek Gusti Muhammad Hatta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, baru-baru ini.

Selain itu, Komisi VII DPR juga menerima dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan program atau kegiatan LPNK 2014 di Kemenristek. Dalam kesimpulannya, Zainudin mengatakan, Komisi VII DPR mendorong Kemenristek untuk lebih meningkat-



Anggota Komisi VII DPR Muhammad Idris Lutfi.

kan koordinasi LPNK di lingkungan Kemenristek agar terprogram dan terencana agar tidak tumpang tindih.

Sementara, Anggota DPR Muhammad Idris Lutfi dari PKS, meminta Kemenristek segera merumuskan dan meninjau ulang pembangunan sistem teknologi. Artinya perlu siasat untuk memperbesar riset dan teknologi dengan memperbesar anggarannya.

Menurutnya, perlu dikembangkan inovasi terus menerus di Indonesia. Selain itu, BPPT diharapkan mempunyai kegiatan yang berbasis teknologi. “Karena itu harus disiapkan skim pinjamannya supaya anak-anak kuliah dapat semangat membangun usaha berbasis teknologi. Harus dipromosikan dan dikembangkan agar dapat membangun perusahaan berbasis teknologi juga,” jelasnya. (si)foto: [iwan armanias/parle](#).

DPR Setujui Pembahasan RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan integritas dan kapabilitas setiap anggota TNI. Demikian dikatakan juru bicara Fraksi PPP DPR Husnan Bey Fananie, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (11/2) siang.

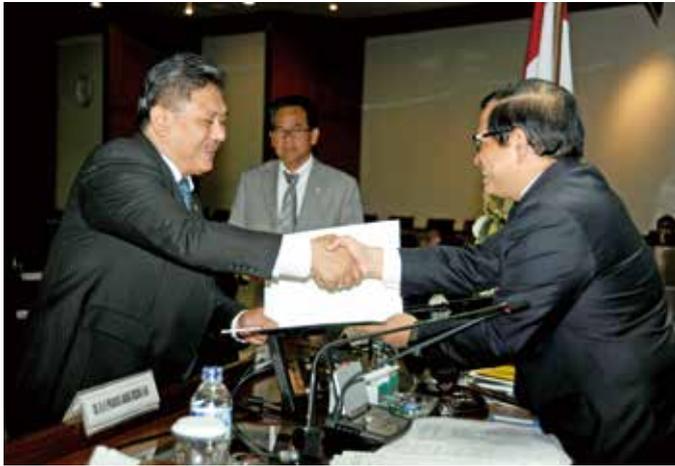
Menurutnya, integritas dan kapabilitas tersebut semakin diperlukan dalam menghadapi tantangan perang asimetrik (*asymmetric warfare*) yang bertumpu pada perang informasi.

Salah satu wujud nyatanya adalah upaya mengubah kepribadian bangsa, termasuk para prajurit, yang saat ini

semakin jauh dari agama, Pancasila dan kebudayaan luhur Indonesia.

Dia mengatakan, tantangan seperti ini lebih kompleks dan jauh lebih sulit diatasi daripada tantangan fisik. Dampaknya pun lebih besar karena dapat mengubah pandangan seorang manusia, termasuk anggota TNI, tentang negara dan bangsa Indonesia, sekurang-kurangnya dapat menurunkan efektifitas operasi militer.

Untuk itu, Fraksinya mendukung RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR ini karena substansinya tidak hanya mengatur kewajiban dan larangan bagi anggota TNI. Tetapi juga, mengatur ketentuan pemberian tugas dan hukum disiplin yang dilakukan oleh atasan.



Jubir F-PPP Husnan Bey Fananie menyampaikan laporan fraksinya kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

“Fraksi PPP mendukung penuh pengajuan RUU Usul Inisiatif tersebut, sehingga kepribadian setiap anggota TNI dapat terjaga, keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT semakin meningkat, dan akhirnya pelaksanaan tugas-tugas TNI dapat terselesaikan secara sempurna,” ungkapnya.

Sementara, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yoseph Umarhadi menambahkan, fakta menunjukkan bahwa saat ini masih sering terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI. Ini dapat dikategorikan sebagai pelang-

garan hukum disiplin militer yang telah mencederai instansi TNI. Belajar dari pengalaman tersebut, maka dianggap penting untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum dalam upaya menertibkan kembali perilaku prajurit TNI agar prajurit menjadi lebih disiplin dan profesional.

Yoseph Umarhadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI ini merupakan bagian dari pembenahan dan penertiban secara internal terhadap tindak pelanggaran oknum anggota TNI dengan memperhatikan pidana militer dan pidana umum.

Perumusan UU Hukum Disiplin Prajurit TNI ini diharapkan tetap mengacu pada nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional. Namun melihat karakteristik institusi militer yang mempunyai standar tertentu diperlukan adanya UU untuk memastikan dapat berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan adanya ruang untuk mengakomodasi kepentingan dimaksud.

Berdasarkan pada pertimbangan seperti yang diuraikan, maka Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI ini menjadi RUU DPR yang selanjutnya untuk dapat segera dibahas pada tingkat berikutnya sesuai tahapan pembentukan peraturan perundangan yang ada. (spy)/
foto:iwan armanias/parle.

Pembebasan Corby Tidak Seirama Dengan Pemberantasan Narkoba



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

Pembebasan bersyarat bagi terpidana narkoba asal Australia Schapelle Leigh Corby cukup menuai banyak kritik. Publik menilai pemerintah lemah terhadap kejahatan narkoba, dan tidak sesuai dengan tekad Indonesia untuk bersih dari narkoba.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pembebasan wanita yang dijuluki Ratu Mariyuana itu tidak melihat kondisi rakyat Indonesia.

“Pemberian klemensi atau grasi bahkan pembebasan hukuman itu adalah hak prerogatif dari Presiden yang telah diatur oleh konstitusi. Tapi bagi saya, ketika Presiden memberikan pembebasan itu kok tidak membaca suasana hati dan situasi kebatinan rakyat kita,” jelas Tantowi sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (11/02).

Politisi Golkar ini menambahkan, dengan pembebasan Corby ini, mengindikasikan pemerintah tidak tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Bahkan, ini juga melukai masyarakat Indonesia.

“Ada ketidaksinkronan antara upaya

kita melalui Badan Narkotika Nasional untuk secara tegas memberantas penyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya adalah penyelundupnya. Tetapi disisi lain kita malah membebaskan gembongnya, nah inikan tidak sinkron dan mengusik perasaan kita. Tiba-tiba dalam situasi seperti ini Presiden memberikan suatu keputusan yang menurut saya tidak berangkat dari suasana hati kita semua,” kata Tantowi.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan ini menambahkan, keputusan yang dibuat Pemerintah Indonesia ini sangat menguntungkan Pemerintah Australia. Sehingga, membuat Perdana Menteri Australia semakin tinggi nilainya.

“Keputusan ini sangat menguntungkan Pemerintah Australia karena salah satu tugas besar kepala negara adalah

menyelamatkan nyawa dari warga negaranya yang terancam hukuman dari negara lain. Nah sekarang dengan keputusan seperti ini, Perdana Menteri Tony Abbott semakin tinggi nilainya dimata rakyat mereka, sementara kita sendiri semakin terpukul,” imbuh Tantowi.

Di kesempatan yang sama, hal berbeda disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat. Ia melihat, pembebasan Corby sudah memenuhi syarat, karena Corby sudah menjalani

hukuman penjara lebih dari separuh dari total hukuman yang diterimanya.

“Apanya yang salah? Dia sudah menjalani hukuman 10 tahun. Dia kan sudah dihukum. Sekarang status dia masih tahanan. Tapi karena dia sudah menjalani hukuman penjara, lebih dari separuh, dia bisa mendapat tahanan kota. Apa yang salah?” tanya Martin kepada media yang mewawancarainya.

Politisi Gerindra ini menilai, kasus ini

hanya dibesar-besarkan. Padahal kasus kejahatan narkoba cukup banyak terjadi di Indonesia.

“Kemarin yang mendapat pembebasan bersyarat kan cukup banyak, lebih dari 1.000 orang. Lalu, seberapa banyak yang kasus narkoba? Ya banyak. Kenapa (kasus Corby) mesti diributkan? Apa karena dia cantik? Atau karena dia orang asing? Ini kan hanya dibuat besar oleh media,” tukas Politisi asal Dapil Sumatera Utara ini. (sf)/
foto:iwan armanias/parle.

DPR Setuju Perubahan Masa Jabatan Anggota BPK



Ketua Komisi XI Olly Dondokambey menyampaikan laporan perubahan masa jabatan anggota BPK kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (11/02), di Gedung Nusantara II, menyetujui Perubahan Masa Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI. Keputusan ini diambil usai Ketua Komisi XI Olly Dondokambey menyampaikan laporannya.

“Usai mendengar laporan dari Ketua Komisi XI perihal Perubahan Masa Jabatan Anggota BPK RI, sekarang perkenankan saya untuk menanyakan kepada sidang dewan, apakah laporan Komisi XI dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo

kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Jawaban “Setuju” pun serentak diucapkan oleh seluruh wakil rakyat.

Dalam laporannya, Olly menyatakan bahwa pada 16 Oktober 2013, Komisi XI menerima surat dari Pimpinan DPR, perihal surat dari Ketua BPK RI. Surat dari Pimpinan DPR ini memutuskan Komisi XI untuk menindaklanjuti surat perihal perubahan masa jabatan Anggota BPK tersebut. Sebagai tindak lanjut dari surat ini, Komisi XI melakukan RDPU dengan Pakar Hukum Tata Negara untuk mendapatkan masukan dan pendapat.

“Komisi XI telah melakukan RDPU dengan Pakar Hukum dan Tata Negara untuk mendapatkan masukan dan pendapat. Oleh pakar hukum dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI-2013 adalah bersifat final,” jelas Olly.

Berdasarkan masukan dari para pakar, Komisi XI melakukan rapat intern pada 18 Desember 2013, dan memutuskan untuk mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI-2013 tertanggal 10 September 2013.

“Dalam surat tersebut, Rapat Intern Komisi XI memutuskan menyetujui perubahan masa jabatan Anggota BPK, yaitu Bahrullah Akbar dan Agus Joko Pramono,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Semula, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU No 15 tahun 2006 tentang BPK hanya melanjutkan sisa jabatan Anggota BPK, yang kemudian digantikan menjadi masa jabatan lima tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI-2013. Putusan MK ini memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. (sf)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Bicara



Anggota Komisi II Gamari Sutrisno.

“Pengawasan sangat penting untuk terselenggaranya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Kami mendorong Bawaslu Jateng untuk mengusulkan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan.”



Anggota Komisi III Martin Hutabarat.

“Saya usulkan DPR buat Petisi untuk memindahkan ibu kota Jakarta. Karena kalau tidak, banjir akan terus terjadi dan dalam satu bulan setiap tahunnya, Jakarta akan lumpuh dan berapa puluh triliun negara kita rugi karena itu.”

“Setiap orang, termasuk orang asing yang sudah tinggal di Indonesia minimal enam bulan lamanya wajib ikut program BPJS Kesehatan, yang merupakan asuransi wajib berbayar yang sifatnya gotong royong dan non komersil. Jika tidak, akan dikenakan sanksi.”



Anggota Komisi IX Achmad Nizar Shihab.

Tidak Ada Pemilu Luber dan Jurdil Setelah Reformasi



Wakil Ketua Komisi II, Khatibul Umam Wiranu.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu menyatakan tidak ada satupun pemilu yang diselenggarakan secara luber dan jurdil setelah reformasi.

“UU Nomor 8 tahun 2012 mengamanatkan pemilu diselenggarakan secara luber dan jurdil. Namun pada kenyataannya tidak terealisasi pada dua pemilu sebelumnya,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi II dengan KPUD se-Jawa Tengah di Gedung KPUD Jateng, Semarang, Senin (10/2)

Realitas yang paling membuat miris, jelas Politisi F-PD, adalah terjadinya penggelembungan suara. Menurutnya, berdasarkan data hasil penelusuran Komisi II yang disampaikan kepada KPUD Jateng bahwa masih ada 2,3 juta data DPT yang belum teridentifikasi validitasnya.

Hal tersebut, tegasnya, dapat menimbulkan terjadinya transaksi jual beli suara, baik oleh parpol maupun oleh calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan DPRD II, DPRD I, DPR RI dan DPD.

“Belajar dari kenyataan, maka Komisi II secara khusus melakukan kunjungan spesifik ke beberapa provinsi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan kesiapan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif 2014,” papar Khatibul.

Ia minta masing-masing KPUD Kabupaten/Kota untuk memverifikasi data hasil penelusuran Komisi II. Pasalnya,

di masing-masing daerah pemilihan Jateng 1 - 10, rata-rata 5% dari jumlah DPT yang sesungguhnya.

Ia juga mengharapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD, harus memastikan pemilu terselenggara secara luber dan jurdil, serta memastikan bahwa masing-masing caleg dan parpol itu mendapatkan haknya sesuai dengan yang dipilih oleh rakyatnya.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Anggota Tim Komisi II DPR antara lain Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja (F-PAN), Rusminiati dan GRAY Koesmoertiyah dari F-PD, Eko Sardjono Putro (F-PG), Budiman Sudjatmiko dan Eddy Mihati dari F-PDIP, Agus Purnomo dan Gamari Sutrisno dari F-PKS, serta Akhmad Muqowam (F-PPP).

Dalam waktu yang sama, terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 ini, Komisi II juga melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. (sc)

DPR RI Sambut Baik GOPAC Timor Leste Berantas Korupsi

DPR RI menyambut baik inisiatif Gugus Tugas Global Organization of Parliamentarians Against Corruptions (GOPAC) Timor Leste yang tengah menggiatkan misinya dalam kampanye perang melawan korupsi baik nasional, regional maupun skala global.

“DPR RI menyambut baik komitmen parlemen Timor Leste melalui gugus tugasnya, dan siap untuk bersama-sama dengan kolega parlemen dari negara tetangga Timor Leste untuk menggerakkan anti korupsi di kawasan,” kata Ketua Gugus Tugas GOPAC Indonesia, Pramono Anung sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam siaran persnya yang diterima Parlemen, Senin, (10/2).



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Perwakilan Timor Leste untuk SEAPAC Francisco Branco dan Maria Lurdes Martins Bessa menegaskan, Timor Leste akan turut berkontribusi pada isu yang menjadi perhatian bersama di

kawasan untuk mengurangi kejahatan korupsi di negara anggotanya.

Dalam usaha SEAPAC untuk mengurangi kejahatan korupsi di negara-negara anggotanya, lanjut perwakilan Timor Leste, sejak dibentuk pada tahun 2013, Gugus tugas GOPAC Timor Leste telah melaksanakan beberapa inisiatif. Antara lain menghadiri berbagai pertemuan regional dan global yang merupakan program GOPAC dan menginisiasi perubahan UU Anti Pencucian Uang Timor Leste agar sesuai standar internasional. Dalam lingkup internal, gugus tugas tersebut telah membentuk sekretariat dan menunjuk Mrs. Nina Freitas sebagai executive Director. (si)/foto:iwan armanias/parle.

PLN Dikritik Keras Komisi VII DPR Karena Listrik Sering Padam

Belum saja mulai RDP Komisi VII DPR dengan Dirut PLN Nur Pamudji, yang direncanakan membahas Tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2013 dan rencana kerja Tahun 2014. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan sejumlah anggota lainnya mengkritik keras kinerja PLN karena seringnya pemadaman di sejumlah daerah.

“PLN harus kembali menormalkan kondisi listrik PLN di Sumatera Utara karena listrik sering padam disana,” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, di Gedung Nusantara I, Senin, (10/2).

Menurut Dirut PLN Nur Pamudji, pelayanan listrik memang belum maksimal karena disebabkan rasio elektrifikasi masih jauh dari harapan

bahkan ada daerah yang masih 20-30



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana berdialog dengan Dirut PLN.

persen. Nur Pamudji mengatakan, tiap daerah berbeda-beda untuk rasio elektrifikasinya, sebagai contoh untuk Kabupaten Banjar Masin rasio elektrifi-

kasinya mencapai 90% dan paling rendah di Kota Baru mencapai 48%. “Memang masih banyaknya daerah yang masih rendah rasio elektrifikasinya, karena masih banyak daerah yang jaringannya sedang di bangun,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk membangun jaringan butuh waktu, PLN menargetkan tahun 2016 untuk rasio elektrifikasi mencapai 90 persen. “Sedang untuk penjualan listrik ada kenaikan tiap tahunnya dan penjualan listrik pada tahun 2013 mencapai 53,6 juta pelanggan dan pada tahun 2014 akan bertambah 4 juta sehingga menjadi 57,6 juta pelanggan baru. Penjualan PLN pada tahun 2013 meningkat 6,93%. Pertumbuhan PLN 1,5 dari pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya. (si) foto:iwan armanias/parle/andri*

Komisi III Akan Perjuangkan Tambahan Anggaran BNPT

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin menyatakan prihatin kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ibarat hidup segan mati tak mau, disuruh kerja berat tetapi anggarannya tidak jelas. “Kita harus mengajukan tambahan anggaran, dengan memanggil Menko Polhukam, Menkeu dan Bappenas. Institusi yang begitu penting dan dinyatakan sebagai pemberantas terorisme, harus didukung anggaran yang memadai,” katanya dalam Rapat dengar pendapat dengan Kepala BNPT Ansyad Mbai di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Pimpinan Komisi III ini juga mendorong BNPT untuk sabar dalam situasi serba tertekan, di saat senjatanya dan teknologinya kurang canggih, tantangan yang dihadapi sangat berat menyangkut nyawa manusia. Situasi di lapangan, kata Aziz, aparat berhadapan langsung dengan teroris memungkinkan petugas di lapangan membunuh, atau terbunuh. Ia juga menyayangkan, saat ini banyak masyarakat yang ragu terhadap kinerja BNPT dalam memberantas terorisme di Indonesia.

“Sudah senjatanya kurang canggih, IT nya nggak canggih, sudah gitu duitnya cekak. Pimpinan Komisi III pernah mengundang ketiga kementerian empat kali tapi tak pernah hadir. Saya usulkan agar dijadwal ulang,” tegas Aziz Syamsudin.



Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin.

Lebih jauh ia menyatakan, pihaknya tidak menyalahkan BNPT sebab kondisi di lapangan makin parah, tidak hanya di Poso, tetapi juga di daerah Lampung, Palembang termasuk Ogan Komering, cuma tidak ter-ekspos. Yang ter-ekspos hanya Poso dan Poso lagi padahal yang lain juga parah.

Dalam RDP tersebut sejumlah anggota mempertanyakan kinerja BNPT dalam pemberantasan terorisme, adanya temuan PPATK dimana ada rekening yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme serta koordinasi lembaga anti teror tersebut dengan Densus 88.

Dalam penjelasannya, Ansyad Mbai mengatakan, dalam

tahun 2012 berhasil ditangkap 89 orang terduga teroris, tahun 2013 sebanyak 110 orang diantaranya 13 orang tewas termasuk 3 orang korban bom bunuh diri. Dari jumlah tersebut sebanyak 85 orang dalam proses pengadilan dan 5 orang dipulangkan.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Pieter Zulkifli S sempat “panas” ketika anggota Komisi III Syarifuddin Sudding meminta BNPT dibubarkan saja. Pasalnya kinerja BNPT tidak ada kemajuan dan laporan yang disampaikan tidak sebagaimana diharapkan. Kontan saja, permintaan pembubaran BNPT ini ditolak keras Ansyad Mbai. *(mp,ar)/ foto:iwan armanias/parle.*

Komisi II Pantau Persiapan Pemilu di NTB



Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR dipimpin Nanang Samodra saat pertemuan dengan jajaran Pemda NTB.

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik untuk memantau persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah masalah menjadi fokus perhatian dalam kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota dewan.

“Kita ingin tahu bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan para penyelenggara pemilu dalam rangka Pileg dan Pilpres mendatang,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II Nanang Samodra dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (10/2/14).

Ia juga menyebut sejumlah isu penting lain yang dicermati yaitu implementasi pelaksanaan peraturan yang telah

dibuat oleh penyelenggara pemilu, upaya perbaikan DPT oleh KPU dan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam perbaikan DPT dan pengadaan logistik.

“Tim Komisi II lainnya juga berkunjung ke provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Temuan lapangan yang kita peroleh akan kita bawa dalam rapat dengan pemerintah dan KPU serta Bawaslu yang ada di pusat,” papar politisi dari FPD yang didampingi sejumlah anggota diantaranya Dimiyati Natakusumah (FPPP), Nurul Arifin (FPG) dan Zainun Ahmadi (FPDIP).

Sementara itu Gubernur NTB M. Zainul Majdi menjelaskan tantangan penyelenggaraan pemilu di daerahnya meningkat terutama karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara dari 9000 menjadi 12000. Itulah sebabnya ia memberi perhatian kepada petugas Linmas yang akan membantu kepolisian dalam pengamanan.

“Kita akan beri perhatian pada kesiapan Linmas dalam mendukung pengamanan pemilu. Sejauh ini data menunjukkan tidak ada gejala yang terlalu berat dalam pelaksanaan pemilu di NTB,” kata Gubernur yang pernah menjadi anggota DPR RI ini.

Terkait perbaikan Daftar Pemilih Tetap, ia mengatakan telah meminta Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk terus berkoordinasi dengan KPU. Ia juga menyebut dalam waktu dekat akan segera mengumumkan dibentuknya Desk Pemilu yang melibatkan sejumlah instansi terkait di daerah. *(iky)*

Hubungan Bilateral Indonesia-China Semakin Erat

Hubungan bilateral Indonesia dan China semakin erat dan membaik. Ini ditandai dengan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara yang juga semakin prospektif dan menguntungkan. Apalagi angka kunjungan turis China ke Indonesia sudah mencapai 900 ribu per tahun.

Demikian mengemuka saat Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jianchao di ruang kerjanya, Senin (10/2). Pemerintah China menyadari pentingnya posisi Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan politik kedua negara. Dubes Liu juga



Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao.

menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah memberi bantuan signifikan atas terjalinnya hubungan baik kedua negara ini.

Bahkan, Dubes Liu memuji Ketua DPR Marzuki Alie yang telah berperan aktif mendekatkan hubungan kedua parlemen dan pemerintahan. Baik Marzuki maupun Liu berharap, hubungan baik ini bisa terus terjaga.

“Hubungan China dan Indonesia pada posisi yang sangat baik, tidak ada satu goresan apapun baik dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Demikian juga turis Tiongkok yang datang ke Indonesia semakin meningkat tajam. Tahun lalu sudah mencapai 900 ribu. Saya yakin, kalau turis dari China ini datang semuanya ke Indonesia, maka target kunjungan di atas 10 juta jadi sesuatu yang sangat gampang. Hanya saja mungkin soal infrastruktur yang harus disiapkan lebih baik lagi, baik untuk transportasi darat maupun udara,” jelas Marzuki usai pertemuan.

Sementara itu, kedatangan Dubes Liu ke DPR sebenarnya untuk berpamitan bahwa dirinya akan segera mengakhiri masa kerjanya di Indonesia yang baru 2 tahun itu. Marzuki sendiri mengaku terkejut, karena Dubes Liu begitu singkat bertugas. “Saya yakin ada pertimbangan lain dari Pemerintah Rakyat Tiongkok. Mungkin ada jabatan yang lebih besar dan penting akan diberikan kepada yang bersangkutan,” ujar Marzuki. (mh), foto : eka hindra/parle/andri*

Humas DPR Gelar Parlemen Kampus



Ketabag Humas DPR Suratna saat menerima 33 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia.

Setelah sukses menggelar program Parlemen Remaja, kini Humas DPR RI segera menggelar kembali perhelatan Parlemen Kampus untuk kalangan mahasiswa seluruh Indonesia. Dari sini disiapkan para pemimpin muda yang akan menjadi wakil rakyat dan memahami bagaimana pengambilan kebijakan di DPR RI.

Dalam acara pembukaan Parlemen Kampus di Operation Room, Nusantara, Senin (10/2), hadir sebagai pembicara Kepala Bagian Humas DPR Suratno dan Dosen Senior Universitas Indonesia Chusnul Maryah. Acara ini diikuti 33 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Pada acara pembukaan, para mahasiswa peserta Parlemen Kampus disugahi tayangan

film pendek berupa seluk beluk wakil rakyat dan cara kerja pengambilan keputusan di DPR RI.

Menurut Suratno, program ini merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Sejak dini masyarakat memang harus diperkenalkan pada dunia politik yang sehat. Ke depan, bangsa dan negara ini dipimpin para pemuda yang mungkin salah satunya mengikuti program Parlemen Kampus ini.

Lewat program Parlemen Kampus, para mahasiswa diajak bersimulasi menjadi anggota DPR RI. Para mahasiswa harus merasakan langsung bagaimana mereka bersidang dan menggelar rapat kerja bila menjadi anggota DPR. Kelak, dengan program tersebut para mahasiswa tidak buta politik dan mendapat bekal yang cukup bila ingin menjadi politisi.

Program Parlemen Kampus, jelas Suratno, sudah memasuki tahun keenam. Mahasiswa diharapkan tidak antipolitik. Sebaliknya mereka harus care, karena mereka akan memperjuangkan aspirasi rakyat. (mh), foto : riska/parle/hr.

Komisi V Tinjau Pengungsi Bencana Sinabung



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau infrastruktur pasca bencana Gunung Sinabung.

Tim Komisi V DPR melakukan Kunjungan Spesifik ke Tanah Karo Medan Sumatera Utara Rabu pekan lalu guna meninjau infrastruktur pasca bencana Gunung Sinabung. Kunjungan dipimpin Ali Wongso Halomoan Sinaga (FPG), dengan beberapa anggota yaitu Bahrum Daidido, Agus Bastian, Eriko Sotarduga BP Sitorus, Yudi Widiana Adia, Hj. Hanna Gayatri dan Nuriswan-to serta Mangara M. Siahaan.

Dalam acara ini Tim Komisi V melakukan peninjauan ke lokasi bencana dampak erupsi Gunung Sinabung. Sebelumnya rombongan mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo dan BNPB Pusat serta BNPB Propinsi Sumut.

Sebelum ke lokasi bencana, Tim Komisi V DPR dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Syamsul Ma'arif disambut Bupati

Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti didampingi seluruh Kepala SKPD jajaran Pemkab Karo.

Selain meninjau lokasi erupsi Gunung Sinabung, Komisi V ingin mendapat laporan perkembangan terhadap penanggulangan berbagai infrastruktur yang rusak akibat erupsi Sinabung. Seperti masalah fasilitas air bersih dan sanitasi di lokasi penampungan, serta rencana relokasi pengungsi, dan perumahan warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hadir pula dalam acara ini Kepala Balai Bina Sumber Daya Air, Kepala Balai Bina Marga, Pejabat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pejabat Kementerian Perumahan Rakyat dan Pejabat Kementerian Perhubungan.

Dalam pertemuan tersebut Ketua

Rombongan Komisi V DPR Ali Wongso Halomoan Sinaga meminta agar Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dapat bersinergi dengan BNPB untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dan untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) di setiap pos pengungsian. "Diusahakan agar Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dapat memenuhi kebutuhan pengungsi dengan membuat MCK permanen, juga kebutuhan air bersih," ujar Ali Wongso.

Komisi V DPR sangat menghargai dan mengapresiasi laporan-laporan perkembangan penanganan bencana Sinabung, juga penyediaan lahan untuk merelokasi pengungsi yang desanya berada di radius 3 km.

Tim Komisi V DPR juga menilai penanganan tanggap darurat bencana Sinabung sudah termasuk baik. Dimana pola penanganan antara BNPB Pusat, BNPB Daerah/ Propinsi, dan Satlak PB Kabupaten Karo, termasuk unsur TNI/Polri, Pemda/Muspida selalu melakukan koordinasi dengan baik.

Untuk penyediaan lahan relokasi bagi para pengungsi akan disediakan oleh BNPB dan Pemda, sedangkan soal biaya akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui BNPB. "Keterlibatan Kementerian PU adalah untuk mendukung upaya penanganan tanggap darurat seperti pembangunan jalan dan pembangunan rumah yang rusak, dan secara teknis akan didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat," tegas Ali Wongso. (spy)

Komisi IX Temukan Kendala Pada Pelaksanaan BPJS

Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz sesuai kunjungan spesifik dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi-Maluku, Rabu (12/2) menemukan beberapa kendala yang membuat pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berjalan kurang maksimal.

"BPJS ini memang merupakan program yang baru, namun sebenarnya gaungnya sudah sejak lama. Namun, dalam kenyataannya masih ada saja beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan di lapangan," ungkap Irgan.

Irgan menjelaskan, hambatan yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari BPJS. Sehingga masyarakat menjadi bingung akan program ini. Sebut saja ketika masyarakat yang notabene sudah menjadi peserta Jamsostek atau Askes yang kini beralih ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seharusnya perubahan tersebut sudah otomatis membuat kartu peserta berubah. Tetapi pada kenyataannya di lapangan untuk menjadi peserta BPJS itu membutuhkan sebuah prosedur migrasi.

“Padahal kan tujuan dari perubahan BPJS itu agar memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan dan ketenagakerjaan,” jelas Wakil Ketua Komisi IX ini.

Selain itu hambatan lainnya dalam program ini adalah dengan adanya sistem rujukan. Dimana ketika akan memeriksakan diri ke rumahsakit, masyarakat harus terlebih dahulu mendapati pelayanan kesehatan dari puskesmas. Kemudian Puskesmas itulah yang akan memberikan surat pengantar atau surat rujukan untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini menurut Politisi dari Fraksi PPP ini sangat berbeda dari sistem sebelumnya yaitu Askes.

Belum lagi dalam program BPJS ini masyarakat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membayar iuran tiap bulannya. Hingga akhirnya yang tercipta adalah kekhawatiran di masyarakat akan penggunaan dana dari iuran yang setiap bulannya akan mereka bayarkan.



Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz menyerahkan cinderamata kepada Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Arief Budiarto.

Agar program BPJS ini tidak bernasib sama dengan sebelumnya yang minim peserta, maka Irgan berharap agar BPJS mampu melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan lewat media massa, namun lebih dari itu dengan mendatangi masyarakat, perusahaan dan serikat pekerja untuk menjelaskan kepada karyawan tentang program tersebut.

“Dengan sosialisasi jemput bola, akan membuat masyarakat dan para pekerja sadar akan manfaat dan pentingnya BPJS bagi dirinya,” tegasnya. (Ayu)

Sekjen DPR Terima DPRD Madiun



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima DPRD Madiun.

Kesetjenan DPR RI tidak hanya mendukung kinerja dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lebih dari itu Kesetjenan DPR RI juga menjadi tempat bagi Kesetjenan DPRD lainnya untuk menimba ilmu tentang bagaimana menjalankan dukungan terhadap kedewanan. Hal tersebut salah satunya terlihat saat Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menerima DPRD Kabupaten Madiun, Senin (10/2).

“Teman-teman dari DPRD Kabupaten Madiun ini ingin mengetahui sebenarnya apa saja persiapan yang dilakukan Kesetjenan menjelang masa purna tugas anggota dewan

dan menyambut anggota baru,” kata Win saat membuka pertemuan dengan DPRD Kabupaten Madiun.

Dijelaskan Win, bahwa dalam melakukan dukungan terhadap kinerja dewan tentunya Kesetjenan harus berpegangan pada Undang-undang dan Peraturan yang ada. Dengan begitu juga akan memudahkan Kesetjenan dalam menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi dari anggota DPR RI dan DPRD adalah sama, walau ada beberapa hal yang juga membedakannya.

Anggota DPR RI misalnya, merupakan Pejabat Negara yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dimana pengangkatan dan pemberhentiannya melalui Keppres atau Keputusan Presiden. Sementara DPRD merupakan perangkat daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian jelas berbeda fasilitas yang diberikan Negara kepada keduanya.

Sementara itu, untuk penghitungan besaran jasa pengabdian yang harus diberikan kepada anggota DPRD memasuki masa purnabaktinya, Win mengatakan bahwa semua itu ada Undang-undang, mekanisme dan tata tertib yang mengaturnya. Berdasarkan masa pengabdian misalnya, dari

satu hingga enam bulan masa bakti akan mendapat jasa pengabdian sebesar enam persen dari gaji pokok anggota dewan, begitupun selanjutnya dapat dilihat dalam undang-undang yang ada.

Sedangkan persiapan untuk para calon anggota yang akan dilantik, biasanya dengan memberikan orientasi atau pengenalan. Hal ini sangat penting untuk memberikan wawasan tentang tugas dan wewenang dari anggota DPRD, khususnya juga menyangkut Perda-perda yang ada. Selain

itu juga pelatihan terhadap tenaga-tenaga ahli para anggota dewan, yang notabene selalu melekat dengan dewan.

“Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, kami disini selalu membuat memori yang isinya apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang belum selesai dikerjakan. Sehingga ada sebuah kesinambungan di dalamnya untuk para anggota dewan. Hal tersebut akan memudahkan anggota dewan yang baru dalam melanjutkan tugas-tugas kedewanan,” paparnya. (Ayu), foto : riska/parle/hr.

Majalah Parlemen DPR Raih Bronze Winner, InMA 2014



Karo Humas dan Pemberitaan Setjen. DPR Djaka Dwi Winarko didampingi Kabag. Pemberitaan Dadang Prayitna menerima penghargaan InMA Award 2014.

Majalah Parlemen DPR berhasil meraih penghargaan *Bronze Winner* dalam ajang *The 3rd Indonesia In-house Magazine Award (InMA) 2014* yang dilaksanakan oleh SPS (Serikat Perusahaan Pers). Majalah yang dikelola oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR ini menarik perhatian dewan juri yang menilai 201 cover media dari 55 lembaga dan korporasi yang berpartisipasi.

“Ini merupakan apresiasi dari para juri profesional yang tentu punya kriteria yang objektif. Penghargaan ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang benar dan sekaligus memotivasi kita untuk bisa lebih baik,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko usai menerima penghargaan langsung dari Ketua Umum SPS yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan di Provinsi Beng-

kulu, Sabtu (8/2).

Ia menambahkan majalah Parlemen saat ini terus berkembang meningkatkan perannya tidak hanya menjembatani informasi internal di Gedung Dewan tetapi juga masyarakat luas. “Parlemen adalah *in house magazine* yang sudah plus plus. Selain menginformasikan tentang DPR, kita juga menyerap kepentingan publik. Media ini juga sebagai jembatan informasi antara DPR dan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas konstitusionalnya,” paparnya.

Itulah sebabnya penyebaran majalah Parlemen juga semakin luas, DPRD seluruh Indonesia, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Perpustakaan di sejumlah daerah sampai ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di beberapa

negara. “Kita bisa seperti ini tentu juga karena dukungan dewan. Ketua DPR sejak awal sudah mencermati kebijakan pemberitaan, *lay out* sampai distribusi. Demikian pula dukungan Sekjen DPR sehingga kita menorehkan prestasi ini,” ujar Djaka.

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo yang turut hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada Parlemen sekaligus menitipkan harapan agar media ini berupaya menjadi *public service information*. “Kita berharap media ini semakin besar, saya bayangkan kedepan bisa melayani eksternal menjadi semacam *public service information* untuk DPR terhadap pihak-pihak luar juga,” katanya.

Malam penghargaan bagi insan media ini dilaksanakan bersamaan dengan acara peringatan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Provinsi yang terkenal dengan keindahan Bunga Rafflesia-nya ini. Dalam ajang InMA 2014 untuk kategori Majalah Pemerintah selain Parlemen DPR juga mendapat penghargaan diantaranya Mediakom - Kementerian Kesehatan, Warta BPK dan Media Keuangan-Kementerian Keuangan.

SPS juga memberikan penghargaan cover terbaik kepada sejumlah surat kabar dan majalah nasional dalam ajang yang diberi nama IPMA - Indonesia *Print Media Award 2014*. Sejumlah media mendapat penghargaan diantaranya Koran Tempo, Kompas, Republika dan Koran Sindo. Untuk kategori Majalah Lokal Berita Ekonomi dan Bisnis meraih penghargaan diantaranya Gatra, SWA dan Tempo. (iky)



Kemendikbud Harus Kaji Ulang Kurikulum 2013

Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengkaji ulang implementasi Kurikulum 2013. Ia menilai, Kemendikbud terlalu memaksakan untuk melaksanakan kurikulum yang mulai diterapkan pada 15 Juli 2013 lalu.

Hal itu ia sampaikan saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendengar langsung dari pelaku pendidikan, seperti Dewan Pendidikan, PGRI, LPMP, LPTK dan guru-guru inti di Kepulauan Riau.

“Saya berpandangan bahwa pemerintah, mestinya mengevaluasi kembali rencana implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2014 secara serentak. Karena, untuk daerah-daerah yang kondisi geografisnya kepulauan dan agak sulit dijangkau, tidak bisa dipaksakan pemerintah untuk melaksanakan secara serentak. Hal ini harus dievaluasi ulang, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah setempat,” kata Zul di Graha Kepri, Batam, Rabu (12/02).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau kecil, harus menjadi perhatian Kemendikbud. Hal ini mengakibatkan sulitnya pendistribusian buku dan pelatihan guru.

“Menyangkut kondisi geografis yang sulit, apalagi di Kepulauan Riau ini, jika dipaksakan malah distribusi bukunya tidak tepat waktu, gurunya juga belum dilatih. Jadi, saya berpikir untuk daerah geografis yang cukup sulit, misalnya daerah kepulauan, daerah pedalaman, daerah perbatasan, itu mestinya dievaluasi, apakah (Kurikulum 2013) perlu segera diterapkan di 2014 ini,” imbuh Politisi Dapil Kalimantan Barat ini.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X Reni Marlinawati. Ia menilai, Kemendikbud terlalu tergesa-gesa melaksanakan Kurikulum 2013, bahkan tanpa didasari oleh penelitian secara ilmiah.

“Ada beberapa masalah yang kami temukan dalam kunjungan spesifik ke Kepri ini. Kurikulum ini tidak didasari oleh penelitian secara ilmiah, dan implementasinya terlalu tergesa-gesa. Kondisi di lapangan ternyata tidak cukup siap untuk melakukan perubahan dalam kurun waktu yang singkat, tanpa persiapan yang matang. Distribusi buku yang tidak merata, dan pelatihan guru juga masih sangat sedikit,” jelas Reni usai pertemuan.

Akibat belum meratanya distribusi buku, tambah Reni, bahkan beberapa sekolah di Kepulauan Riau sampai harus mem-fotocopy buku-buku Kurikulum 2013 ini.

Terkait dengan kondisi geografis, tambah Politisi Fraksi-PPP ini, provinsi yang memiliki banyak pulau ini, harus mendapat perlakuan istimewa. Karena dikuatirkan, akibat



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

kurang perhatian pemerintah, masyarakatnya tidak akan mendapatkan haknya.

“Terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), harus ada program-program khusus, salah satunya Kepri, harus mendapat perlakuan khusus. Tentang Kurikulum yang akan diterapkan di daerah-daerah 3T ini, kalau tidak disikapi secara cepat dan benar, mengakibatkan daerah itu tidak memperoleh haknya. Parahnya, implementasi Kurikulum 2013 tidak akan berjalan,” khawatir Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Untuk itu, ia akan menyampaikan hasil temuan ini kepada Kemendikbud. Harapannya, hal ini akan segera ditindaklanjuti.

“Kita akan sampaikan yang kami temui sekarang. Nanti kami informasikan, dan kita buat beberapa rekomendasi, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pihak kementerian,” ujar Reni.

Hampir sama dengan Reni, Zul juga akan menyampaikan hasil temuan ini kepada Mendikbud M Nuh pada rapat kerja. Bahkan, ia mendesak Kemendikbud untuk segera mengkaji hal ini.

“Saya mendesak Kemendikbud untuk mengevaluasi kembali tentang rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 secara serentak pada Juli 2014 ini. Dengan waktu yang tersisa, kondisi geografis yang ada, kemudian persiapan pelatihan guru, rasanya kita pesimis ini bisa dilaksanakan secara serentak. Jadi saya mendesak pemerintah untuk mengkaji hal ini,” tutup Zul.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux yang diamini Kepala Dinas Pendidikan Yatim Mustafa mengatakan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP dan setingkatnya, SMA dan setingkatnya, serta SMK berjumlah 53 sekolah.

“Dari 6.000 guru sasaran di Kepri, baru 65 orang yang mendapat pelatihan menjadi guru inti atau *master teacher*. Masalah lainnya, belum meratanya distribusi buku, sehingga dilakukan penggandaan untuk disebar ke sekolah yang belum menerima buku,” jelas Robert. (sf)

Terima Kasih atas
Dukungan Pimpinan dan Anggota DPR RI
Keluarga Besar Sekjen DPR RI
serta seluruh Pembaca Setia

Majalah Parlementaria Meraih Penghargaan

Bronze Winner

The 3rd Indonesia In-house Magazine Award (InMA) 2014

Dalam rangka Hari Pers Nasional
di Provinsi Bengkulu, 8 Februari 2014

